

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi perkembangan, keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.¹

Dalam rangka pemberdayaan (*empowering*) daerah dan pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan di daerah propinsi dan pemerintahan kabupaten / kota.

Pelaksanaan pengembangan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Untuk mengembangkan daerah otonom di Indonesia, maka pemerintah daerah perlu menggali potensi daerah

¹ Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 106

sesuai dengan penerapan otonomi daerah. Daerah berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sejalan dengan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karenanya daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah²

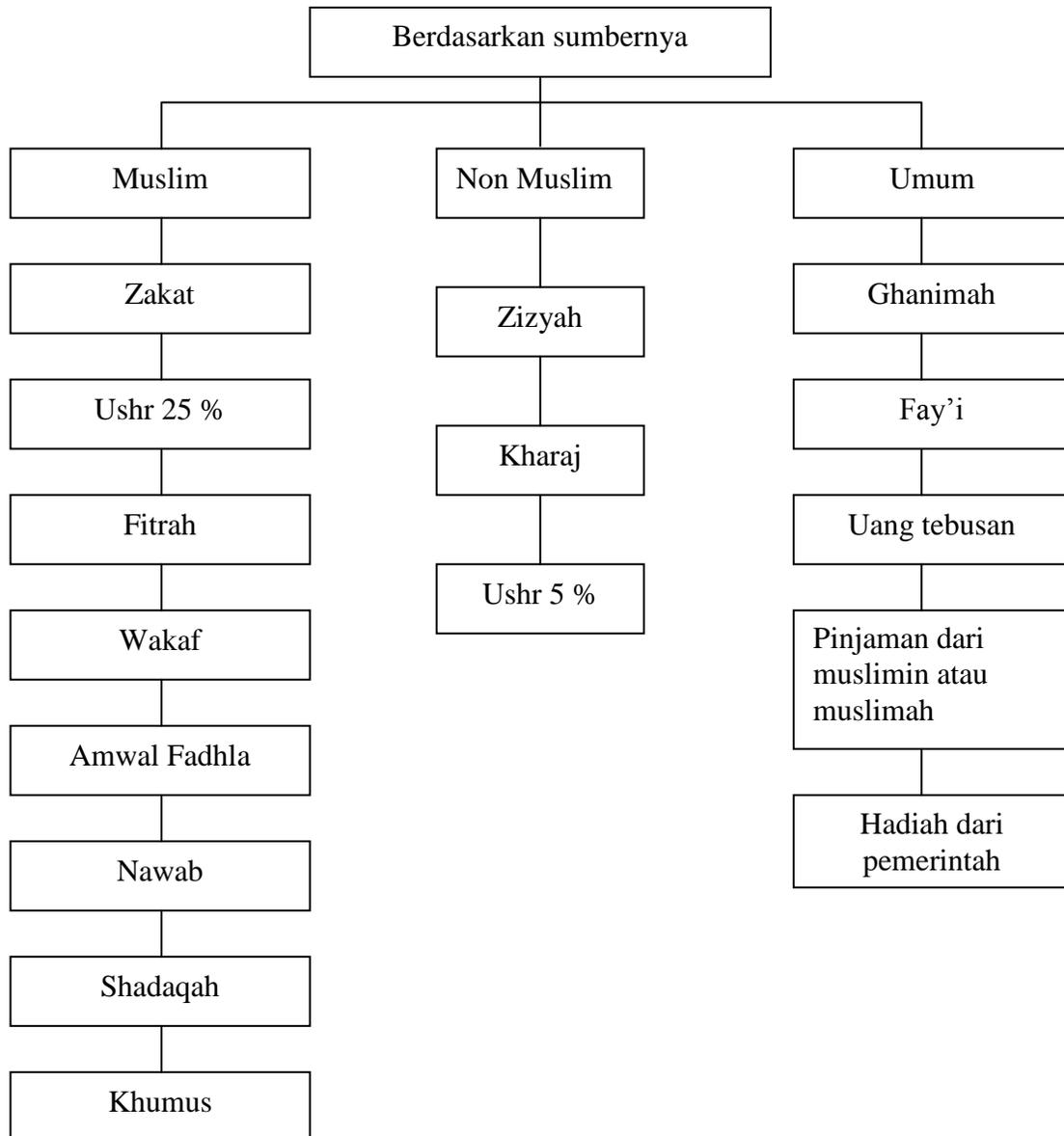
PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan daerah dari sektor retribusi maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa objek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor

² Tim Redaksi Fokus Media, Undang-Undang Otonomi Daerah 2006, (Bandung : Fokus Media, 2006), h. 110

pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Di Indonesia pada saat ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Islam, dari zaman pemerintahan Rasulullah SAW telah dipelajari dan dikenal masalah keuangan Publik, namun dikelompokkan atas siapa pembayarannya atau sumbernya, seperti bagan berikut :

**Bagan 1.1: Pendapatan Publik Berdasarkan Sumbernya
Masa Pemerintahan Rasulullah SAW³**



³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 64

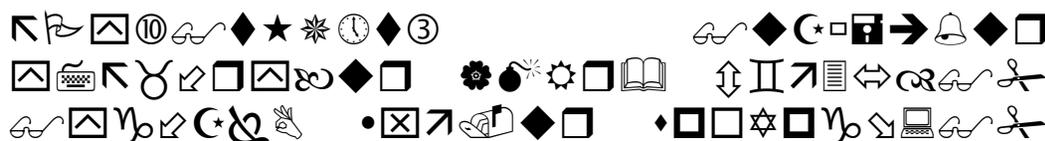
Salah satu pemikir Islam yang membahas ini adalah Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M), dalam kitab yang ditulisnya Abu Yusuf berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak.⁴

Pendapatan utama negara dalam sistem ekonomi islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu: (1) Ghanimah, (2) Shadaqah, dan (3) Fay'i.⁵

Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menurut sistem ekonomi Islam lebih memegang peranan penting jika dibandingkan kebijakan moneter. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat dan larangan melakukan riba, yang menyiratkan bahwa kedudukan kebijakan fiskal lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter.

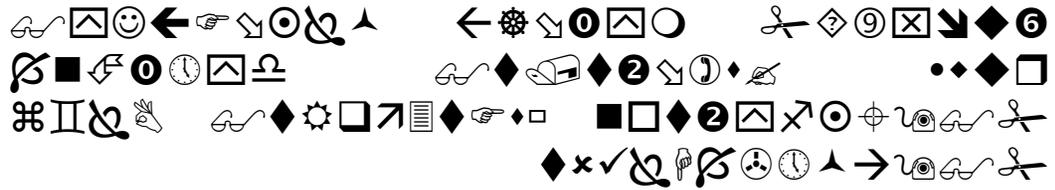
Kebijakan tentang zakat dan pajak, akan dipengaruhi pula oleh kebijakan umum pemerintah tentang pendapatan negara. Kebijakan tentang pendapatan negara akan dipengaruhi pula oleh kebijaksanaan fiskal yang diambil suatu negara melalui menteri keuangan.

Sistem ekonomi Islam muncul sejak adanya umat manusia itu sendiri. Oleh karenanya, teori bagaimana memperoleh pendapatan telah diajarkan oleh Allah SWT sejak turunnya Wahyu (QS. Al-Baqarah ayat 35):



⁴ Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi ke-tiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), h. 83

⁵ Gusfani,, *op.cit.* h. 83



Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Pemerintah dewasa ini terus meningkatkan perkembangan kepariwisataan, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang tengah direncanakan maupun yang telah dilaksanakan seperti membangun dan penambahan daerah tujuan wisata, kampanye sadar wisata, tahun kunjungan wisata, festival budaya dan sebagainya. Semuanya itu dilakukan agar wisatawan yang datang semakin banyak dan semakin lama tinggalnya.

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan (multi sektoral) dan erat hubungannya dengan perkembangan ekonomi global. Disamping itu kepariwisataan merupakan kegiatan yang mengandalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam tanpa merusak potensi alam yang dimiliki. Dalam Islam Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan sumberdaya alam tetapi dilarang untuk merusaknya dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan, seperti dalam AlQur'an Surah Al Qashash ayat 77 :





Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁶

Pengembangan kepariwisataan nasional diharapkan mampu menggalakkan kegiatan ekonomi sedangkan kenyataannya sektor pariwisata belum mendapatkan perhatian yang serius dan pemberdayaan yang optimal.

Kota Banjarmasin mempunyai potensi bidang pariwisata yang sangat menarik dan dapat dikembangkan, objek wisata yang menonjol di kota Banjarmasin dikenal dengan “Objek Wisata Sungai”. Dikenal demikian karena letak geografis kota Banjarmasin memang dikelilingi oleh perairan atau sungai. Bagi warga Banjarmasin, keberadaan sungai adalah urat nadi kehidupan, segala aktivitas kehidupan hampir sebagian besar bergantung pada sungai.

Objek Wisata Sungai merupakan satu paket perjalanan wisata yang ada di kota Banjarmasin, yang terdiri dari Pasar Terapung, Pulau Kembang, Pulau Kaget dan Makam Sultan Suriansyah, pemukiman terapung Kuin Kecil serta menikmati wisata kuliner Soto Banjar terapung. Biasanya Dinas Pariwisata Kota menyediakan satu paket wisata sungai ini apabila ada wisatawan yang berkunjung

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga percetakan Al Qur'an Raja Fahd, 1971), h. 623

ke Banjarmasin. Para wisatawan yang berminat berpetualang di atas Sungai Barito tidak perlu repot lagi apabila ingin menikmati wisata di Banjarmasin.⁷

Mengingat objek wisata yang ada dan potensinya cukup besar diperkirakan perkembangannya akan cukup besar dimasa mendatang. Objek Wisata Sungai yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD kota Banjarmasin terlebih dengan adanya kunjungan Wisata Kalimantan Selatan ditahun 2009, Festival Budaya Terapung 2010 yang telah lewat menjadikan kota Banjarmasin sebagai pemegang posisi kunci dalam mewakili citra Kalimantan Selatan sebagai daerah tujuan Wisata Sungai.⁸

Tetapi keberadaan Objek Wisata Sungai di kota ini akan kurang berdaya guna apabila pemerintah daerah dan kota sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik, terutama faktor-faktor penunjang objek wisata seperti daya tarik, sarana dan prasarana serta promosi.

Dari penjelasan diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti secara mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Objek Wisata Sungai di kota Banjarmasin, dan bagaimana kontribusinya terhadap PAD kota Banjarmasin. Dimana penelitian ini di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Objek Wisata Sungai Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

⁷ <http://JPNN.pasarterapung.com> (diakses tanggal 6 januari 2010)

⁸ <http://disporbudpar.kalselprov.go.id> (diakses tanggal 20 Juni 2010)

1. Bagaimana pengelolaan Objek Wisata Sungai Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Kontribusi Objek Wisata Sungai di Kota Banjarmasin terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pegelolaan adalah suatu kegiatan menjalankan, merawat menjaga, dan mempertahankan sesuatu untuk menuju sasaran yang dikehendaki.⁹ Yang dimaksud dengan pengelolaan disini adalah pengelolaan Objek Wisata Sungai sehingga dapat memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Banjarmasin.
2. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata yang merupakan perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Objek wisata yang perlu dikelola disini adalah objek wisata sungai yang ada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 473

3. Wisata Sungai merupakan satu paket dari beberapa objek wisata yang ada terdiri dari Pasar Terapung, Pulau Kembang, Musium Wasaka, Makam Sultan Suriansyah, makam Habib Basirih, yang dapat di tempuh melalui jalur sungai.
4. PAD

Menurut UU No. 25 Th 1999 PAD diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Objek Wisata Sungai Oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Objek Wisata sungai di kota Banjarmasin terhadap Pendapatan Asli Daerah.

E. Kajian Pustaka

Ketertarikan penulis mengangkat judul dalam masalah ini adalah ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Objek Wisata Sungai di kota Banjarmasin, dan bagaimana kontribusi adanya objek wisata sungai terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Sampai saat ini yang penulis ketahui belum begitu banyak riset atau kajian yang ditemukan berkaitan dengan persoalan yang akan penulis teliti, khususnya di kampus tempat penulis menimba ilmu.

Namun penulis menemukan satu penelitian yang membahas hal yang serupa berbeda lingkup atau wilayah penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setianingsih Nim: 3353401045, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Pengembangan Objek Wisata Serulingmas Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar Negara”, Selain itu penulis juga mengkaji buku-buku tentang otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah, serta buku tentang ilmu Pariwisata.

F. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain, yakni :

1. Kepentingan studi ilmiah dan terapan disiplin ilmu kesyariahan di bidang Ekonomi Islam yang nanti analisisnya membahas tentang Pengelolaan objek Wisata Sungai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.
2. Bahan masukan dan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih jauh dari penelitian ini dalam aspek yang berbeda.
3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dan dinas pariwisata agar meningkatkan perhatiannya terhadap obyek wisata sungai yang menjadi citra wisata di kota Banjarmasin.

4. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur bagi kepustakaan Fakultas Syariah serta IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian adalah sebagai berikut :

Dalam Bab I, adalah gambaran latar belakang masalah penelitian yang menguraikan dari permasalahan yang ditemukan penulis dilapangan yang mana masalah tersebut berkaitan langsung dengan judul penelitian, setelah itu persoalan yang ada dilatar belakang masalah tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan, dalam rangka memperoleh tujuan penelitian untuk memperoleh suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Dalam Bab ini juga dikemukakan batasan istilah dalam penelitian yang bermakna umum, serta adanya signifikansi penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan mengatur jalur penelitian sehingga terarah.

Bab II landasan teoritis. yaitu suatu teori untuk memecahkan masalah yang membahas tentang Pengelolaan objek wisata, keuangan daerah dan pendapatan daerah, pendapatan publik menurut ekonomi Islam, yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dan sebagai pedoman dalam penganalisaan data.

Bab III adalah, membahas metode penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengolahan dan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV penyajian data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, bagaimana pengelolaan Objek Wisata Sungai di kota Banjarmasin, dan kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah.

Bab V penutup, terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat namun jelas.